



## Kepemimpinan dan Akuntabilitas Keuangan di Pemerintah Daerah (Sebuah Telaah Literatur)

Fran Giska Fadhiya Haya<sup>1</sup>, Syukri Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: 22 Juni 2021  
Revised: 15 Januari 2022  
Accepted: 29 Januari 2022

### KEYWORDS

Accountability, Leadership, Regional Autonomy, Local Government

### CORRESPONDENCE

E-mail: [Frgiskaaa@gmail.com](mailto:Frgiskaaa@gmail.com)

### ABSTRACT

*This literature discusses about the relation between leadership and accountability in local government. Accountability can develop in a transparent and democratic manner as well as freedom in expressing opinions. Therefore, the government must really realize that government and services cannot be separated from the public. The realization of regional financial accountability will be the basis for better governance and the government can provide financial accountability from public funds managed by local governments in order to gain public trust. Regional financial accountability is the responsibility of local governments related to regional financial management for the welfare of the community openly and honestly through the media in the form of presenting financial reports. Leadership is one of the important aspects of the organization, especially in the scope of local government administration. In the recent period, leadership is required to focus more on how the role of leadership in an organization will have a positive impact on the organization. Local governments face great pressure in the implementation of regional autonomy. There are two important institutions in local government, namely DPRD and regional apparatus based on regional regulations. Accountability to local governments will grow when supported by an accountable work environment. The main element of the environment is leadership.*

### PENDAHULUAN

Sektor publik di Indonesia sudah semakin berkembang dan berakibatkan akuntabilitas publik baik pada pusat maupun daerah semakin kuat (Indriasih & Koeswayo, 2014). Di Indonesia sendiri konsep akuntabilitas bukanlah hal yang baru dan hampir semua instansi dan lembaga pemerintahan menekankan kepada konsep akuntabilitas khususnya pada saat menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Akuntabilitas keuangan adalah bentuk dari pertanggungjawaban pemerintahan baik pusat maupun daerah kepada publik ketika menggunakan dana publik dengan efisien, efektif, dan ekonomis serta tidak terdapat pemborosan, kebocoran, dan bentuk korupsi lainnya. Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum) terdiri dari empat dimensi yaitu penyusunan rencana keuangan (Budgeting process), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan keuangan (Zeyn ; 2011).

Akuntabilitas dapat berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, Oleh sebab itu pemerintah harus benar-benar menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi dasar bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan dari dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah guna mendapatkan kepercayaan masyarakat. Foster (2000) memiliki pendapat bahwa akuntabilitas dapat dicapai

dengan baik apabila menggunakan kontrak, hal ini juga tergantung pada kemampuan untuk mereduksi semua hubungan akuntabilitas menjadi kewajiban dimana adanya hubungan prinsip/agen.

Keberhasilan dan kegagalan organisasi sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan dan tercapainya visi juga misi dari organisasi tersebut. Seperti itu pula pada pemerintahan daerah yang sangat ditentukan oleh bagaimana pemimpin daerah tersebut menciptakan visi dan misi yang realistis dan terukur demi mewujudkan keberhasilan di suatu daerah. Pemimpin daerahlah yang berperan untuk membuat visi misi yang mempunyai pandangan jauh kedepan guna memajukan dan menyejahterakan rakyat di daerahnya. Pendapat para ahli menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah inti dari manajemen kepemimpinan yang juga berhubungan dengan kemampuan motivasi, komunikasi, dan hubungan antar manusia. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi seseorang agar bekerja dengan ikhlas demi mencapai tujuan bersama (Terry ; Sulistiyani 2011,12).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepemimpinan Daerah Pasca Otonomi Daerah**

Kepemimpinan adalah salah satu aspek penting pada organisasi terkhususnya pada lingkup administrasi pemerintahan daerah. Pada Kaloh (2009) Juuji Misumi berpendapat bahwa kepemimpinan adalah subjek penting pada manajemen dan administrasi karena kepemimpinan berkaitan dengan hubungan antara bawahan dan atasan dalam suatu organisasi. Otonomi daerah adalah Hak dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal (1) ayat 5).

Pada periode akhir-akhir ini kepemimpinan di haruskan untuk lebih berfokus kepada bagaimana peran pimpinan di suatu organisasi akan memberikan dampak positif terhadap organisasi. Kaitan antara kinerja suatu organisasi dengan Sumber daya manusia pada proses pelaksanaan organisasi publik berpusat pada kemampuan daerah untuk menyiapkan jajaran birokrasi yang ada bagi penyelenggaraan pelayanan publik secara optimis dan berguna. Hal ini adalah akibat logis dari pelaksanaan otonomi yang berbasis pada kemampuan daerah dengan memberikan pelayanan publik secara mandiri, efektif, dan terpadu. Seperti kebanyakan pimpinan pada organisasi lainnya, Kepala Daerah dihadapkan pula dengan berbagai tantangan dalam menjadi pimpinan organisasi administrasi daerah.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pimpinan daerah mewujudkan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai suatu pemikiran baru yang didukung dengan adanya kualitas sumberdaya keuangan, sumberdaya alam, aparatur yang prima, juga sarana dan prasana yang memadai, yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kehidupan masyarakat melalui program dan strategi pemberdayaan juga pelayanan (Kaloh, 2009).

Menurut Kaloh (2009), kepada daerah sebagai pemimpin organisasi administrasi pemerintah daerah diharuskan untuk dapat bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas guna membangkitkan semangat bekerja para bawahannya. Daerah yang menerima Otonomi hanya Aceh dan Papua, yang berarti kedua daerah ini memiliki keistimewaan bahwa dana otonomi dalam struktur pendapatannya sebagai hasil dari penerimaan bagi hasil alam yang lebih besar terutama pada sektor minyak dan gas yang diberikan ke provinsi.

Pemerintah daerah menghadapi tekanan yang besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terdapat dua lembaga yang penting dalam pemerintah daerah yaitu DPRD dan perangkat daerah yang berbasis tentang peraturan daerah. Untuk mengaplikasikan suatu kebijakan tidaklah mudah, Hogerwerf dalam wahab (2004) mengatakan untuk dapat mensukseskan kebijakan pemerintah dibutuhkan implementasi yang baik. Implementasi disini berarti upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber-sumber yang dipilih.

### **Akuntabilitas Keuangan di Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah demi menyejahterakan masyarakat secara terbuka dan jujur melalui media  
Haya, F.G.F & Abdullah, S

berupa penyajian laporan keuangan. Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik bukan hanya ditentukan oleh akuntabilitas, namun kualitas pemerintah yang baik juga ditentukan oleh faktor lain seperti *responsiveness, consensus orientation, equity efficiency, effectiveness dan strategic vision*.

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas dapat dikatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, dimana, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Akuntabilitas terdiri atas pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga mereka dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan tidak hanya pada aspek aktivitas finansialnya saja. Dalam Hartati (2008) Sinclair (1995) mengatakan ada lima bentuk dari akuntabilitas yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas publik, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas profesional dan akuntabilitas. Penelitian Soleman (2007) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia mengatakan bahwa kebanyakan pemerintah daerah saat ini masih memiliki nilai akuntabilitas yang rendah dan rata-rata hanya dibawah nilai B di sepanjang tahun 2016. Semenjak disetujuinya Aceh menganut otonomi daerah, pemerintah Aceh mulai mendapatkan sumber daya keuangan yang jumlahnya sangat besar yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh bank dunia pada tahun 2006 menunjukkan bahwa Aceh belum dapat dengan efektif dan maksimal memperdayakan sumber keuangan tersebut. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada 39 kota di Indonesia, mayoritas responden menunjukkan kekecewaan terhadap komitmen pemerintah daerahnya untuk memberantas korupsi dan pelaporan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah Daerah Aceh tidak lagi diharuskan untuk melaporkan proses alokasi sumber daya dan proses implementasinya kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya memiliki wewenang untuk mengevaluasi juga memantau pelaksanaan hibah dari alokasi khusus. Daerah Aceh mendapatkan hak untuk menerima pendapatan tambahan hingga 2% dari alokasi DAU nasional selama 15 tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2022 dan 1% dari tahun 2023 hingga 2028 (UU Pemerintah Aceh (LOGA) No.II/2006). Pemerintah daerah Aceh harus menunjukkan Akuntabilitas dari pelaksanaan hibah ini kepada masing-masing kementerian dan kementerian keuangan.

### **Hubungan Kepemimpinan dan Akuntabilitas**

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan, Kepemimpinan memegang peranan yang sangat besar. Diperlukannya kepemimpinan merupakan salah satu bentuk untuk mengantisipasi keterbatasan yang ada pada diri individu, dikarenakan hal itulah muncul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Achmad Suyuti berpendapat bahwa maksud dari kepemimpinan adalah sebuah proses untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan, juga perilaku seseorang untuk digerakkan demi tujuan tertentu. Menjadi seorang pemimpin tentu bukanlah hal yang mudah, salah satu tipe pemimpin yang dikatakan paling ideal adalah pemimpin bertipe kepemimpinan demokrasi. Seseorang pemimpin daerah, seperti pemerintah daerah tentunya memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya, salah satu bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Akuntabilitas adalah konsep pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik, akuntabilitas yang efektif tergantung dari aksesibilitas publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi terbuka untuk dapat memberi akses ini biasanya media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, fan website memberikan perhatian langsung atau peranan yang memotivasi akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Akuntabilitas pada pemerintah daerah akan tumbuh ketika didukung dengan lingkungan kerja yang akuntabel. Unsur utama dari lingkungan tersebut adalah kepemimpinan. Lingkungan akuntabilitas mengarah pada suatu keadaan dimana di dalamnya akuntabilitas dapat terjalan dengan baik. Lingkungan kerja yang akuntabel secara optimal merupakan salah satu akuntabilitas yang proaktif dimana pemerintah hanya berfokus kepada pencapaian hasil yang maksimal dibandingkan hanya memikirkan langkah untuk menjelaskan hasil buruk yang diperoleh. Kepemimpinan menjadi unsur penting dalam menciptakan lingkungan akuntabel, pemimpin dapat mengarahkan pekerjaan kepada para karyawannya dan dapat memperkenalkan dan membangun akuntabilitas. Oleh karena itu, unsur kepemimpinan menjadi sangat penting untuk menciptakan dan mewujudkan akuntabilitas.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### Kesimpulan

Kepemimpinan adalah sebuah sifat yang diterapkan oleh seseorang (pemimpin) untuk dapat mempengaruhi anggota organisasinya guna mencapai tujuan dan sasaran. Otonomi daerah adalah Hak dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal (1) ayat 5). Kepala Daerah dihadapkan pula dengan berbagai tantangan dalam menjadi pimpinan organisasi administrasi daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pimpinan daerah mewujudkan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah sejatinya harus menarik kepercayaan publik terhadapnya, salah satunya dengan memperlihatkan pertanggungjawaban atas dana publik yang dikelola pemerintah untuk mensejahterakan publik atau masyarakat daerahnya. Akuntabilitas dapat diartikan secara umum sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemenuhan suatu tanggung jawab. Kepemimpinan dari pemerintah daerah memegang peranan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, para pemimpin memiliki hak untuk mengendalikan dan mengatur para karyawannya, oleh karena itulah kepemimpinan dapat digunakan untuk membangun dan memperkenalkan akuntabilitas dengan memberikan contoh, menjadi seseorang yang memiliki dan menggunakan pertimbangan yang bijaksana, dan selalu berada pada jalur yang bersih.

### Saran

Diharapkan penelitian kedepannya dapat lebih banyak mengambil literatur yang kaya akan informasi sehingga dapat dijadikan sumber penelitian yang andal.

## REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Policy Analysis: From Formulation to Implementation of State Policy*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aprila, N., & Sepriani, E. (2017). GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR DI INSTITUSI MILITER (TNI-AD) KOTA BENGKULU. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 13-34.
- Auditya, L., & Husaini, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Basri, H., & Nabiha, A. S. (2014). Accountability of local government: The case of Aceh Province, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 3(1), 1-14.
- Dewi, N., Azam, S., & Yusoff, S. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373-1384.
- Garnida, D., Mangkuprawira, S., Hermawan, A., & Pasaribu, B. (2011). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 8(1), 10-19.
- Hoerudin, C. W., & Maolani, D. Y. (2019). Supervision and Control of The Government Internal Supervisory Apparatus in The Implementation of Regional Autonomy. *International Journal of Science and Society*, 1(1), 56-69.

- Indriasih, Dewi dan P. S. Koeswayo. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control toward the Quality of Financial Reporting and its Impact on the Performance Accountability in Local Government. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol.5. Issue 1 December. p.90-100. ISSN 2289-1560.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Koswara, E. (2003). *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IIP Pres. LAN. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: LAN.
- Kluvers, R., & Tippett, J. (2010). Mechanisms of accountability in local government: an exploratory study. *International journal of Business and Management*, 5(7), 46.
- Ludani, M. M., Tampi, G. B., & Pombengi, J. D. (2015). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(029).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Prihana, E. (2020). *KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN*.
- Wijaya, M., Susanti, N., & Afriani, S. (2017). Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(2).
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27-29.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan*. Volume 1. No 1. Hal 21-37. Universitas Pasundan, Bandung.